

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Meningkatnya kebutuhan akan tanah yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk, kemajuan industri dan pembangunan kantor-kantor pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan hal yang wajar dan tidak dapat dihindari, lalu akibatnya terjadilah pergeseran budaya dalam penggunaan tanah di Indonesia yakni dari basis sektor pertanian ke non pertanian karena tuntutan pembangunan. Namun meningkatnya kebutuhan tanah ini tidak diikuti ketersediaan tanah yang memadai karena luas tanah yang cenderung tetap dan tidak bisa bertambah, sehingga kompetisi dalam pemanfaatan lahan untuk pertanian maupun non pertanian tidak dapat dihindari. Imbasnya adalah terjadi penyusutan lahan pertanian di Indonesia akibat pengalihan status tanah pertanian menjadi lahan non pertanian. Oleh karena itu permasalahan alokasi penggunaan atas lahan haruslah senantiasa diperhatikan agar tercapai struktur penggunaan yang terbaik dan distribusi penggunaan tanah yang adil sehingga sejalan dengan visi dan misi kehidupan kebangsaan.

Fenomena penyusutan lahan pertanian akibat pengalihan status tanah pertanian terutama area persawahan di Indonesia persentasenya cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana secara Nasional dalam periode tahun 1979-1999, pengalihan status tanah pertanian di Indonesia mencapai 1.627.514 hektar atau 81.376 per tahun. Sementara itu dalam kurun waktu 1999-2002, laju pengalihan semakin tinggi, yaitu sekitar 132.000 hektar pertahun. Dan terakhir berdasarkan data dari Direktur Jendral Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Departemen Pertanian Jakarta tahun 2005 menunjukkan bahwa sekitar 187.720 hektar sawah di Indonesia telah dialih statuskan untuk penggunaan di luar pertanian per tahunnya. Lebih mengkhawatirkan lagi. Jika RTRW (Rencana

Tata Ruang Wilayah) pada saat ini tidak ditinjau kembali maka dari total lahan sawah beririgasi (7,33 juta ha), hanya sekitar 4,2 juta ha yang dapat dipertahankan fungsinya, sisanya terancam terkonversi ke penggunaan lain¹. Tentunya hal ini dikhawatirkan berdampak pada berkurangnya ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya berbagai kemungkinan masalah yang timbul sebagai akibat dari benturan kepentingan penguasaan dan penggunaan tanah satu pihak dengan komitmen pembangunan yang harus dilakukan pihak lain, maka diperlukan upaya pengaturan atau pengendalian penggunaan tanah.

Pengaturan dan pengendalian penggunaan tanah sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi konflik dan sengketa, misalnya dalam perebutan bidang-bidang tanah tertentu. Pengaturan dan pengendalian tanah juga diperlukan agar kepentingan masyarakat yang satu dan kepentingan masyarakat lainnya dapat berjalan seimbang, sehingga tercapailah tujuan pokok kemakmuran dan keadilan bagi rakyat seluruhnya. Maka dari itu, untuk pengembangan wilayah dengan memanfaatkan sumber daya tanah dan ruang, terutama untuk kegiatan pembangunan, hendaknya dilakukan secara rasional, terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar sektor dalam pemanfaatan ruang dan tanah. Dengan adanya perencanaan diharapkan pemanfaatan ruang dan sumber daya lainnya dapat terpadu guna mencapai sasaran pembangunan antara lain, peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, kelestarian sumber daya alam disamping pemenuhan kebutuhan dasar.

Sejalan dengan uraian di atas, peneliti telah melakukan survey awal tentang alih fungsi lahan persawahan dan perkebunan seluas $\pm 22,6$ Ha di wilayah Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango untuk menjadi kantor Pemerintahan Provinsi Gorontalo. Dari hasil survey diketahui bahwa pembangunan gedung perkantoran Pemerintah Provinsi Gorontalo di Desa Tinelo Ayula

¹ Winoto Joyo. *Seminar Nasional Studi Kebijakan Tata Ruang Pertanian..* <http://www.penggunaan-lahan-pertanian.co.id> diakses tanggal 12 Mei 2014

ditinjau dari status tanah ternyata masih tarik menarik antara masyarakat dengan pihak pemerintah sedikit bermasalah karena ada beberapa kelompok masyarakat yang kurang setuju pembayaran tanah yang ditetapkan pemerintah yang tidak sesuai dengan harga yang diinginkan oleh masyarakat, selain itu di areal tanah yang akan dibangun kantor ini masih terdapat lokasi pekuburan yang belum jelas penanganannya sebab masyarakat tidak mau jika kuburan ini dipindahkan di tempat yang tidak layak. Ditinjau dari pemanfaatan tanah dan nilai ekonomi bagi masyarakat ternyata alih fungsi lahan perkebunan dan persawahan menjadi kantor pemerintah Provinsi Gorontalo secara akan berdampak pada penurunan jumlah hasil pertanian dan pendapatan masyarakat sebab mata pencaharian masyarakat yang bertani akan berkurang dan masyarakat bisa beralih pada mata pencaharian sebagai pedagang.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Respon Masyarakat Tentang Adanya Pembangunan Gedung Perkantoran Provinsi Gorontalo (Suatu penelitian di Desa Ayula Tinelo Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango)”

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yakni:

- a. Bagaimana respon masyarakat tentang adanya pembangunan gedung perkantoran Provinsi Gorontalo di Desa Tinelo Ayula Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango?
- b. Bagaimana status tanah yang dibangun gedung perkantoran Provinsi Gorontalo di Desa Tinelo Ayula Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui respon masyarakat tentang adanya pembangunan gedung perkantoran Provinsi Gorontalo di Desa Ayula Tinelo Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango.
- b. Untuk mengetahui status tanah yang dibangun gedung perkantoran Provinsi Gorontalo di Desa Tinelo Ayula Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu sosial yang berhubungan dengan respon masyarakat adanya pembangunan gedung perkantoran Provinsi Gorontalo di Desa Ayula Tinelo Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan dalam pembangunan gedung perkantoran Provinsi Gorontalo di Desa Ayula Tinelo Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan dalam melaksanakan pembangunan gedung perkantoran Provinsi Gorontalo di Desa Ayula Tinelo Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango
- b. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan gedung perkantoran Provinsi Gorontalo di Desa Ayula Tinelo Kecamatan Bolango Selatan Kabupaten Bone Bolango

